WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR: 2 /KEP/BAKEUDA/I/2018

TENTANG

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN/
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan pelimpahan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 10);

19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Pejabat yang diberi wewenang mengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat yang diberi wewenang mengelola keuangan daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Penerima Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerima Pembantu, dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

KEENAM : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

KETUJUH : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

KEDELAPAN : Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.

KESEMBILAN : Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018.

KESEBELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 2 /KEP/BAKEUDA/I/2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

No.	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Koordinator pengelola keuangan daerah : 1. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2. Mempersiapkan pedoman pelaksanaan APBD 3. Mempersiapkan pedoman pengelolaan barang daerah 4. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepada kepala daerah
	Kepala Badan Keuangan Daerah	1 Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah d. Melaksanakan fungsi BUD e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah antara lain : - menandatangani SPP dan kwintasi dana bagi hasil, hibah dan bantuan keuangan propinsi. - menandatangani bukti penerimaan dana transfer pemerintah pusat - menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP) - dan tugas lain yang dilimpahkan kepala daerah 2 PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah mempunyai wewenang : a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD d. Memberikan petunjuk tehnis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah f. Menetapkan SPD

No.	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
		g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah h. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah i. Menandatangani dokumen keuangan antara lain : - Surat Penyediaan Dana (SPD) - DPA-OPD / DPPA OPD - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Surat Penolakan Penerbitan SP2D - dan dokumen lain yang di limpahkan kepala daerah
	Kepala Bidang Pendapatan	1. Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah 2. Menandatangani Surat Ketetapan Pelunasan Piutang Pajak Daerah
4	Kepala Bidang Perbendaharaan	1. Mempersiapkan penerbitan SP2D 2. Mempersiapkan Surat Penyediaan Dana
5	Kepala Bidang Anggaran	1. Mempersiapkan Anggaran Kas
6	Kepala OPD, Kepala UPT, Kepala Bagian, dan Pejabat lain apabila di tunjuk sebagai PA / KPA	1. Selaku Pengguna Anggaran a. Menyusun RKA dan DPA OPD b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja c. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran e. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan f. Memerintahkan pembayaran SPM g. Menandatangani SPM UP/GU/TU dan SPM LS h. Mengelola barang milik daerah i. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja k. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya l. Pejabat yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas dikarenakan Pejabat Definitif belum ada maka tugas dan wewenang sama dengan Pengguna Anggaran dan disebut sebagai Pengguna Anggaran

No.	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
		2. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran d. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Menandatangani SPM LS dan SPM TU f. Mengelola barang milik daerah g. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja i. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya j. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran
7	Bendahara Pengeluaran	1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP LS 2. Menerima dan menyimpan uang persediaan serta melakukan pembayaran dengan Uang Persediaan yang dikelolanya 3. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD 4. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan keperbendaharaan selaku bendahara pada OPD
8	Bendahara Penerimaan	Menerima, menyimpan, menyetorkan dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 2 /KEP/BAKEUDA/I/2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018

PEJABAT PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

No	NAMA / NIP	JABATAN	SPECIMENT	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	AGUSFENDI, SE 196508201990031006	Bendahara Umum Daerah		
2.	SRI HANDAYANI, A.Ks 197409052005012009	Kepala Bidang Pendapatan		
3.	NATALIAWATI, S.AP 196912251990032004	Kepala Bidang Perbendaharaan		
4.	SHENDI ADITIA, SE 19761124 200003 2 002	Kepala Bidang Anggaran		

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 2 /KEP/BAKEUDA/I/2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018

DAFTAR PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN / BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH			
1.1	Muhammad Irwansyah	Pengguna Anggaran		
1.2	Rizka Fitrianda 19800823200701 1 010	Bendahara Pengeluaran		
2.	SEKRETARIAT DAERAH			
2.1	Radmida Dawam, SH, MH 196401271993032001	Pengguna Anggaran		
2.2	Adi Priyono, Amd 198408172010011010	Bendahara Pengeluaran		
3.	BAGIAN UMUM			
3.1	Untung Budiyono, S.Pd 196307241988031002	Kuasa Pengguna Anggaran		
3.2	Wahyu Akhirudin 198308112008011002	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
4.	BAGIAN ADMINISTRASI KESRA DAN KEMASYARAKATAN			
4.1	Arham Naning, SE 196006251981031007	Kuasa Pengguna Anggaran		
4.2	Intan Kurnia 198702052009032003	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
5.	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN			
5.1	Suhaimi, SH 197103192005011004	Kuasa Pengguna Anggaran		
5.2	Eryanto 197712052009011008	Bendahara Pengeluaran Pembantu		

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
6.	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL DAN TEKNOLOGI INFORMASI			
6.1	Drs. H. Hasan Rumata 196506072000031001	Kuasa Pengguna Anggaran		
6.2	Ahmad Rosadi Rangkuti, S.Sos 198809192015021001	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
7.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
7.1	Irma Mutiahsari, S.S 197109072005012008	Kuasa Pengguna Anggaran		
7.2	Alvi Dyaningtyas, S.S 198907122015022003	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
8.	BAGIAN ORGANISASI			
8.1	H. Hasan Basri, SH 196304231986031006	Kuasa Pengguna Anggaran		
8.2	Saputra Utama, A.Md 198704032010011008	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
9.	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN			
9.1	Iskandar Aidul Fitri, SE 196801031990031003	Kuasa Pengguna Anggaran		
9.2	Ria Faguna Sukma, SE 197411222009012005	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
10.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN			
10.1	Drs. Juhaini 197406151999031002	Kuasa Pengguna Anggaran		
10.2	Erwin Purnama 197401062007011003	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
11.	BAGIAN HUKUM			
11.1	Muhamad Syahrial, SH, MH 197107132005011006	Kuasa Pengguna Anggaran		
11.2	Ariska Mega silviani, SH 198703292015022002	Bendahara Pengeluaran Pembantu		

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
12.	DPRD / SEKRETARIAT DPRD			
12.1	Drs. Akhmad Elvian 196510141989031004	Pengguna Anggaran		
12.2	Syahrial 198311152008011005	Bendahara Pengeluaran		
13.	INSPEKTORAT			
13.1	Drs. M. Nasir, MM 195910031980031005	Pengguna Anggaran		
13.2	Siswanto 19660306198603 1 007	Bendahara Pengeluaran		
14.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH			
14.1	Drs. Agus Suryadi, M. Si 197308091993031002	Pengguna Anggaran		
14.2	Harwanty, A.Md 197209292011012001	Bendahara Pengeluaran		
15.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH			
15.1	Agung Yubi Utama, SE, M.TP 196911071996031003	Pengguna Anggaran		
15.2	Herdoni 198403222010011001	Bendahara Pengeluaran		
16.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
16.1	dr. Syahrizal, M.Kes 196109151990011001	Pengguna Anggaran		
16.2	Susi Susanti, SE 19760814201001 2 004	Bendahara Penerimaan (BLUD)		
16.3	Tamrin Halomoan L, SE 19780801201001 1 015	Bendahara Pengeluaran		

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
17.1	Suhartini. MS, SH, MM 196002161981012001	Pengguna Anggaran		
17.2	Feriyawan 197602232008011002	Bendahara Pengeluaran		
18.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
18.1	Drs. Iwansyah 196402101990011003	Pengguna Anggaran		
18.2	Lismayanti 198410042012122003	Bendahara Penerimaan		
18.3	Elen Erani, A.Md 198502082010012024	Bendahara Pengeluaran		
19.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
19.1	Mikron Antariksa, A.Ks, M.Si 197407291994031003	Pengguna Anggaran		
19.2	Yanti Widiastuty, Amd 198101262010012011	Bendahara Pengeluaran		
20.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN			
20.1	Lie Jun Jie, SE, MM 196008171984031006	Pengguna Anggaran		
20.2	Ngatiman 196402092007011004	Bendahara Penerimaan		
20.3	Hasmawaty Fitri 197808252012122002	Bendahara Pengeluaran		

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
21.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
21.1	Mie Go, ST 197301072000031005	Pengguna Anggaran		
21.2	Desi Ekawati 196812071994122005	Bendahara Penerimaan		
21.2	Y. Qona Annisa, A.md 198711142010012011	Bendahara Pengeluaran		
22.	BADAN KEUANGAN DAERAH			
22.1	Agusfendi, SE 196508201990031006	Pengguna Anggaran		
22.2	Suhendra, SE 197702252010011005	Bendahara Pengeluaran SKPKD (Khusus Pos Bantuan)		
22.3	Elis Susanti, SE 198404092008122001	Bendahara Penerimaan		
22.4	Syaftiansah, A.Md 198010062014071004	Bendahara Pengeluaran		
22.5	Jazirah Seridewi, A.Md 197601142010012002	Bendahara Penerimaan SKPKD		
23.	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN			
23.1	Drs. Akhmad Subekti, M.Si 196603261986031004	Pengguna Anggaran		
23.2	Holijah 19631101198303 2 003	Bendahara Penerimaan		
23.3	Andi Achmad 197811292008011002	Bendahara Pengeluaran		
24.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
24.1	Drs. Edison Taher 195801281984031003	Pengguna Anggaran		
24.2	Sungkono 196302031986021003	Bendahara Pengeluaran		

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
25.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
25.1	dr. H. Ristum Alamsyah,Sp.S 196104141989031003	Pengguna Anggaran		
25.2	Suriyanto, SE 196405121989031013	Kuasa Pengguna Anggaran		
25.3	Wahyudi, AM.Kep 198708042010011001	Bendahara Penerimaan		
25.4	Novia Kurniasih, SE 198011102011012005	Bendahara Pengeluaran		
26.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
26.1	Suparlan Dulaspar, ST 196207051985031020	Pengguna Anggaran		
26.2	Suhiyat, SE 197010082009011003	Bendahara Pengeluaran		
27.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
27.1	Donal Tampubolon. AP, M.Si 197505221993111001	Pengguna Anggaran		
27.2	Marlina Sari 197810272007012016	Bendahara Pengeluaran		
28.	DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
28.1	Fitriansyah , A.Ks, M.Si 197111211993031005	Pengguna Anggaran		
28.3	Selfia Indarina 197809292007012018	Bendahara Pengeluaran		

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
29.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
29.1	Drs. Armada, MM 196003051986031009	Pengguna Anggaran		
29.2	Felisia Arinindyah, A.Md 198705132010012008	Bendahara Pengeluaran		
30.	DINAS PARIWISATA			
30.1	Anggo Rudi, SE, MM 196208241990031006	Pengguna Anggaran		
30.2	Liyana 198408072010012003	Bendahara Penerimaan		
30.3	Sumiati, SE 198303102012122002	Bendahara Pengeluaran		
31.	DINAS PERHUBUNGAN			
31.1	Drs. Asban Aris, MH 196602241994121003	Pengguna Anggaran		
31.2	Aprilia, SE 19750427200903 2 004	Bendahara Penerimaan		
.3	Vivir Irham 198608282006041002	Bendahara Pengeluaran		
32.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
32.1	Rasdian Setiadi, S.IP 196909202014101001	Pengguna Anggaran		
32.2	Andi Bayumi. TS 197008102006041005	Bendahara Penerimaan		
32.3	Nasrullah, A.Md 198003052007011004	Bendahara Pengeluaran		

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
33.	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA			
33.1	H. Abdul Ghoni, SE, M.Si. 19650120198903 1 008	Pengguna Anggaran		
33.2	Sutria 199307062015032001	Bendahara Penerimaan		
33.3	Usap Asbani 19680322198910 1 001	Bendahara Pengeluaran		
34.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
34.1	Drs. Latip Pribadi, M.Si 196008071981091001	Pengguna Anggaran		
34.2	Sulisdiana 198004192006042004	Bendahara Pengeluaran		
35.	KECAMATAN BUKIT INTAN			
35.1	Efran, S.STP 198207072001121005	Pengguna Anggaran		
35.2	Febriani Widyaningsih 198902022015022001	Bendahara Pengeluaran		
36.	KECAMATAN RANGKUI			
36.1	Muhammad Subhan, SE 196901052006041001	Pengguna Anggaran		
36.2	Tri Handayani, Amd 197408092014072002	Bendahara Pengeluaran		
37.	KECAMATAN GERUNGGANG			
37.1	Khotaman Barka, S.STP 198302102001121002	Pengguna Anggaran		
37.2	Sumarlin 197706072012121003	Bendahara Pengeluaran		

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
38.	KECAMATAN TAMAN SARI			
38.1	Susanto, SH, MH 196902192002121001	Pengguna Anggaran		
38.2	Topan Firmansyah 198212112012121002	Bendahara Pengeluaran		
39.	KECAMATAN PANGKALBALAM			
39.1	Suwito Agussalim, BA 196106041980011001	Pengguna Anggaran		
39.2	Sucipto 198209152006041007	Bendahara Pengeluaran		
40.	KECAMATAN GABEK			
40.1	Haris Munandar, S.STP 198301152001121002	Pengguna Anggaran		
40.2	Norma Lestiowaty 19791014200701 2 003	Bendahara Pengeluaran		
41.	KECAMATAN GIRIMAYA			
41.1	Yansyah Tri Darmawan Putra, 197601101996021003	Pengguna Anggaran		
41.2	Miranda Rosadi 198505152015022001	Bendahara Pengeluaran		
42.	UPT LABORATORIUM KESEHATAN			
42.1	Rina Wijayanti, SKM 197703262000032002	Kuasa Pengguna Anggaran		
42.2	Irliyandra, SST 198608062008041001	Bendahara Penerimaan Pembantu		
42.3	Erna, SKM 198110032006042022	Bendahara Pengeluaran Pembantu		

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
43.	UPT PUSKESMAS GIRIMAYA			
43.1	dr. Hisar Mangoloi Manalu 197603202005011007	Kuasa Pengguna Anggaran		
43.2	Sri Dalina, AM.kep 198612142010012014	Bendahara Penerimaan Pembantu		
43.3	Sariniarti, Amd 198108222011012005	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
43.4	Junita Sari 198206282010012020	Bendahara Dana Kapitasi JKN		
44.	UPT PUSKESMAS AIR ITAM			
.1	dr. Fitriana 197310062006042009	Kuasa Pengguna Anggaran		
44.2	Rini Oktaviani, NERS, S.KEP 198310152008122001	Bendahara Penerimaan Pembantu		
44.3	Tuty Resnawati, AMK 198807192010012009	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
44.4	Dewi Indrasari, Amd 198011202015022001	Bendahara Dana Kapitasi JKN		
45.	UPT PUSKESMAS PASIR PUTIH			
45.1	drg. Triani Umaiyah 198412082011012007	Kuasa Pengguna Anggaran		
45.2	Siti Sofiah 196210171986112001	Bendahara Penerimaan Pembantu		
45.3	Saparina, AMK 198810042010012012	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
45.4	Tri Hastuti, S.Kep 198307192006042005	Bendahara Dana Kapitasi JKN		

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
46.	UPT PUSKESMAS MELINTANG			
46.1	Hj. Dina, SKM 196311231988022001	Kuasa Pengguna Anggaran		
46.2	Herlina, AMK 198011102006042017	Bendahara Penerimaan Pembantu		
46.3	Hayati, AMK 198002082006042021	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
46.4	Hanny Jauriah, AMK 197903232006042010	Bendahara Dana Kapitasi JKN		
47.	UPT PUSKESMAS PANGKALBALAM			
47.1	dr. Hj. Tri Wahyuni Masrohani 197606152010012010	Kuasa Pengguna Anggaran		
47.2	Riza Apriyanti, AM. Kep 198303182006042008	Bendahara Penerimaan Pembantu		
47.3	Agung Nugroho, AMK 198506192010011011	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
47.4	Fienna Maria 198303182006042008	Bendahara Dana Kapitasi JKN		
48.	UPT PUSKESMAS SELINDUNG			
48.1	Emi Yuliani, SKM 197107051991032001	Kuasa Pengguna Anggaran		
48.2	Renny Sandra, AM.Keb 197601202006042004	Bendahara Penerimaan Pembantu		
48.3	Eva Reni 198706152017042001	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
48.4	Ami Famela Aprilia 198404142017042001	Bendahara Dana Kapitasi JKN		

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
49.	UPT PUSKESMAS GERUNGGANG			
49.1	Cut Rahmawati, SKM 197709092001122004	Kuasa Pengguna Anggaran		
49.2	Sopiah, AMK 197712202010012010	Bendahara Penerimaan Pembantu		
49.3	Endah Sulistyowati, S.Kep 198612262009042000	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
49.4	Megawati, AMK 197612042006042003	Bendahara Dana Kapitasi JKN		
50.	UPT PUSKESMAS TAMAN SARI			
50.1	dr. Desy Arie Pranoto 198012282010012009	Kuasa Pengguna Anggaran		
50.2	Ritta Afendi, AMK 198205122010012031	Bendahara Penerimaan Pembantu		
50.3	Priska Deliyanti, Am. Keb 198103312011012001	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
50.4	Yulda, AMK 198010252006042023	Bendahara Dana Kapitasi JKN		
51.	UPT PUSKESMAS KACANG PEDANG			
51.1	drg. Helen 198012092009032003	Kuasa Pengguna Anggaran		
51.2	Kiki Lismana, AMK 197908152006042025	Bendahara Penerimaan Pembantu		
51.3	Lily Yuniarsih 198112022006042012	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
51.4	Lisma, AMK 198303262006042005	Bendahara Dana Kapitasi JKN		

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN	SPECIMENT	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
52.	UPT GUDANG FARMASI			
52.1	Suhairi, SKM 196405081994031003	Kuasa Pengguna Anggaran		
52.2	Andry Yanti, SKM 198412302011012001	Bendahara Pengeluaran Pembantu		

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MUHAMMAD IRWANSYAH